



Pemda DIY Raih WTP ke-15 Kali



KR-istimewa

Penyerahan WTP dari BPK RI kepada DPRD DIY dan Pemda DIY.

YOGYA (KR) - Pemda DIY kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Setidaknya ini menjadi tahun ke-15 bagi Pemda DIY dalam meraih WTP. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024 tersebut diserahkan oleh BPK Negara V kepada Ketua DPRD dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di DPRD DIY, Rabu (23/4).

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD DIY, Nuryadi dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. "Pencapaian ini menandai keberhasilan DIY dalam mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut. Ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan," ujar Widhi dalam sambutannya.

Meskipun kembali meraih predikat tertinggi, BPK RI tetap menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti. Dalam LHP tersebut, BPK menyoroti belanja hibah serta penyaluran dana bergulir melalui BUKP (Badan Usaha Kredit Produktif) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Widhi menegaskan, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah korektif guna menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan BPK. Ini demi terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil. Kami mendorong Pemda DIY untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat. Rekomendasi BPK bukan sekadar catatan administratif, melainkan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan," tambahnya.

Penyerahan LHP DIY menjadi yang pertama kali dilakukan BPK RI terhadap LKPD pemerintah provinsi di tahun 2025. Ini menjadikannya sebagai indikator kesiapan dan kinerja pengelolaan keuangan DIY yang unggul dibanding daerah lain.

BPK RI juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, terutama terkait dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian alokasi transfer ke daerah. Pemerintah daerah, bersama DPRD, dituntut lebih cermat, selektif, dan efisien dalam menyusun dan menyalurkan anggaran publik. (Awh)-f